

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia menjadikan masyarakat yang memiliki suatu komunitas dalam sistem organisasi, budaya dan menjaga silaturahmi. Masyarakat islam yang berkualitas secara konseptual adalah dengan mewujudkan kehidupannya melalui konsep – konsep dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Safei, 2017:77). Faktanya, masyarakat islam sebagai masyarakat yang ada dalam suatu kelompok dengan berbagai sikap, perasaan yang sama, memiliki kebiasaan dan tradisi seperti halnya masyarakat sosial pada umumnya.

Konsep masyarakat islam ini disandarkan berdasarkan keseimbangan dan pandangan dasar islam terhadap sesama makhluk. Keseimbangan yang memiliki hubungan keterkaitan antara individu dan sosial maka dengan demikian konsep masyarakat islam yang berkualitas dapat dilihat dalam konteks kemanusiaannya. Masyarakat islam yang mampu memaksimalkan antara perbedaan maupun persamaan, persaudaraan dan kerja sama antar sesama. Hal ini dapat membentuk sebuah konteks kemanusiaan yang saling menguatkan, menyempurnakan serta tolong menolong sesama.

Masyarakat dalam konteks Pengembangan Masyarakat Islam, bukan semata hanya melakukan konseptualisasi dari kehidupan yang telah sesuai dengan konsep Al-Quran, Hadits dan Sunnah. Pemberdayaan hadir sebagai proses pengembangan masyarakat, yang dimaksudkan untuk sebuah proses yang lebih baik, lebih maju dari sebelumnya. Pengembangan masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan terhadap masyarakat yang dapat mengidentifikasi

mengenai kebutuhan, dapat memperoleh sumber daya lebih baik guna memenuhi kebutuhan serta dapat memberdayakan kehidupan mereka secara bersama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki peran sangat penting, dimana penelitian ini dapat menjadikan jurusan pengembangan masyarakat islam sebagai wadah atau tempat bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan isu-isu sosial yang ada di masyarakat.

Budaya patriaki masih banyak yang menjalankannya di Indonesia. Awal budaya patriarki ini dianggap kewajiban peran laki-laki sebagai seorang ayah atau kepala keluarga untuk mengendalikan dan menentukan sandang, pangan dan papan. Menurut Pinem (2009:42) patriarki merupakan sosial budaya yang muncul dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam budaya ini laki-laki perannya lebih diutamakan dibandingkan dengan peran perempuan. Perbedaan pria dan wanita ini berawal dari kebiasaan dan pola pikir masyarakat, hal ini mengakibatkan adanya ketidakadilan pada perempuan baik dalam pengalaman, tanggungjawab, status dan kesempatan. Salah satu dampak yang paling besar dari masyarakat yang berbudaya patriarki yaitu adanya ketimpangan antar gender yang kemudian timbulnya kekerasan gender, penerima dampak seriusnya adalah perempuan. Adanya perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan pola pemikiran tradisi budaya yang kodrat, guna menyetarakan pemenuhan hak gender mulailah bermunculan suara demokrasi berupa gerakan untuk menuntut hak kesetaraan gender.

Salah satu kasus yang kerap terjadi di Indonesia mengenai kesetaraan gender yaitu berupa kekerasan. Dari beberapa kekerasan terhadap perempuan dikarenakan adanya perbedaan dalam gender. Kekerasan kerap terjadi karena permasalahan-

permasalahan yang mendasar dari adanya isu-isu gender, seperti adanya kesenjangan dan ketimpangan, rendahnya angka harapan hidup antar gender dan rendahnya komposisi perempuan disbanding laki-laki dalam keikutsertaan organisasi masyarakat. Dalam Pedoman Bab II Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2016:49) menerangkan bahwa kasus laporan yang sering terjadi di Kota Bekasi adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap seorang istri atau perempuan. Rekapitulasi dari hasil pendampingan dan atas pelaporan kasus tersebut yaitu 267 kasus pada tahun 2019/2020.

Isu gender juga menjadi salah satu faktor terhambatnya pembangunan, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia. Adanya ketimpangan pada salah satu kelompok masyarakat dalam pemberdayaan khususnya perempuan, dikarenakan berbagai masalah yang berada di masyarakat dan saling berkaitan satu sama lain. Permasalahan yang paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Isu gender yang sering terjadi menyebabkan adanya diskriminasi, kesenjangan dan ketimpangan yang dipusatkan kepada perempuan. Ketimpangan tersebut mengakibatkan perempuan menjadi lemah dalam keberadannya. Meskipun demikian, perempuan juga mempunyai peran dan keterlibatan dalam aspek pembangunan. Peran perempuan dalam aspek pembangunan sangat strategis dalam beberapa sektor utama penting yaitu dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan

pendidikan. Sejauh ini, keterlibatan kaum perempuan dalam aspek sektor utama tersebut sudah mampu dilakukan dengan baik, dengan ini pemerintah dan pihak terkait lainnya perlu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan supaya kontribusi kaum perempuan lebih optimal.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut dengan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPTA) dalam bidangnya yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG) supaya hak gender terutama perempuan dapat terealisasi dengan baik. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) ditunjukkan kepada seluruh menteri, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, provinsi serta kota dan kabupaten agar mampu menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang mempertimbangkan jalan keluar dari permasalahan melalui kebutuhan aspirasi perempuan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum tujuan dari bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) memastikan perempuan dan laki-laki harus mendapat kesetaraan dan keadilan dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat yang sama atas pembangunan dan pemberdayaan. Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan program, pemerintah mencantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 sampai 2025.

Rencana program tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan hak perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan, penurunan kasus KDRT dan diskriminasi pada perempuan. Tujuan penguatan jaringan bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) agar

seluruh komponen masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dalam memperoleh akses, partisipasi dan kontrol.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “***PERAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) TERHADAP KESETARAAN HAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN***” (*Studi Deskriptif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bekasi*).

B. Fokus Penelitian

1. Apa Program yang dilaksanakan bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan hak pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan hak pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi?
3. Apa Hambatan yang di alami oleh bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesetaraan hak pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah di uraikan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat di susun sebagai berikut :

1. Mengetahui program yang dilakukan oleh bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan hak pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi.

2. Mengetahui pelaksanaan program bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan hak pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi.
3. Mengetahui hambatan yang dilalui oleh bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan hak pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi khasanah keilmuan mengenai bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap kesetaraan hak pemberdayaan perempuan.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap agar manfaat dari penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Bekasi terhadap pemberdayaan perempuan dan menjadi bahan evaluasi bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam upaya menyetarakan hak perempuan.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Dengan sebelum adanya laporan penelitian ini sebagai referensi, gambaran dan perbandingan dalam konsep penelitian ini, terdapat penelitian yang sesuai yang pernah dilakukan yaitu :

- a. Skripsi oleh Dwi Ramadhan yang berjudul "*Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai*".

Hasil penelitian dalam skripsi ini mengungkapkan bahwa kesetaraan

gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan yang terjadi pada perempuan dan laki-laki dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan dapat merasakan manfaat pembangunan yang sama. Pada angka indeks pembangunan gender di kota Dumai, menunjukkan hasil perbedaan angka terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang paling terlihat yaitu pada tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana partisipasi tersebut tertinggi diduduki oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

- b. Skripsi oleh Novela Rasni yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman”*. Hasil penelitian dalam skripsi tersebut menyebutkan bahwa penelitian tersebut di latar belakang dengan rendahnya tingkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan rendahnya kualitas pelaksanaan program yang dijalankan oleh masing-masing OPD di Kabupaten Pasaman. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman sudah terlaksana tetapi belum optimal. Kendala dalam implementasi kebijakan yaitu minimnya pengetahuan tentang gender, adanya pergantian posisi pegawai, pelaksanaan PPRG yang belum optimal dan terbatasnya anggaran program yang mendukung bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

2. Landasan Teoritis

Konsep pemberdayaan hadir karena adanya upaya penguatan sosialisasi pada kelompok masyarakat. Upaya dalam pemberdayaan guna mengembangkan, mengubah, membangun dan dapat memotivasi masyarakat agar memiliki hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberdayaan perempuan menurut Karls yang dikutip oleh Syafi'i Ma'arif merupakan proses penyadaran dan pembentukan kualitas diri terhadap partisipasi yang lebih besar seperti kekuasaan, pengawasan, pengambilan keputusan dan tindakan perubahan yang bertujuan meningkatkan perwujudan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki. Menurut Zubaedi (2013 : 21-22), menyatakan bahwa ada empat perspektif dalam pemberdayaan :

Pertama, perspektif pluralis yang melihat pemberdayaan sebagai proses menolong individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya dapat bersaing secara lebih efektif. Perspektif pluralis melakukan kegiatan untuk menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran mengenai bagaimana menggunakan keahlian dalam melobi dengan menggunakan lisan atau media yang berhubungan dengan tindakan politik dan mampu memahami bagaimana aturan main dalam suatu sistem.

Kedua, perspektif elitis dimana dalam perspektif ini berpendapat dalam melakukan pemberdayaan melalui upaya mempengaruhi kaum elit dengan membentuk ikatan terhadap mereka, melakukan pertentangan dan mengupayakan perubahan kalangan elit. Hal ini dilakukan supaya mengandalkan kaum elit, mengingat bahwa masyarakat menjadi tidak berdaya karena adanya sebuah pemberdayaan yang kuat dari kaum elit.

Ketiga, perspektif strukturalis dimana dalam pemberdayaan dapat digunakan sebagai perjuangan yang lebih karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Karena, dalam suatu pemberdayaan masyarakat sebagai langkah pembebasan yang harus dilakukan dengan dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental dan hilangnya penindasan struktural.

Keempat, perspektif post strukturalis yang mengemukakan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan intelektual daripada dengan aksi. Dalam persepektif ini lebih ditekankan untuk kategori pendidikan. Perspektif ini menganggap bahwa pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan melalui pemahaman, perkembangan pemikiran baru.

Pemberdayaan dilakukan untuk sebuah perubahan sosial, baik dalam pola pikir masyarakat yang masih tertinggal, masyarakat yang lebih berdaya serta mendapatkan kebebasan berkehidupan. Mendapatkan kebebasan adalah hak pribadi yang dapat dijalankan dan diterima oleh seluruh masyarakat, dimana tidak adanya perdebatan dari budaya patriarki atau tidak adanya perbedaan gender.

Menurut Mufidah (2008:4), gender adalah perbedaan dalam peran, fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan akibat konstruksi budaya yang dapat berubah seiring berkembangnya zaman. Perubahan zaman yang semakin modern ini penting adanya kesetaraan gender. Dengan adanya kesetaraan gender akan membuat masyarakat terbuka akan pola pikir yang memiliki wawasan luas serta pandangan baru tentang gender, yang pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

Menurut Sasongko (2009 : 16-21), ada beberapa teori mengenai kesetaraan dan keadilan gender. *Pertama*, Teori Nurture adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari hasil konstruksi sosial dan budaya sehingga terjadinya perbedaan peran dan tugas. *Kedua*, Teori Nature merupakan sebuah kodrat dan sudah menjadi takdir adanya perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki sehingga harus diterima. *Ketiga*, Teori Equilibrium merupakan keseimbangan antara dua teori sebelumnya, yang dimana pada teori ini perempuan dan laki-laki harus menekankan konsep kemitraan, keharmonisan serta saling bekerja sama dalam kehidupan masyarakat, keluarga, bangsa dan negara.

Teori-teori yang telah di paparkan diatas, kemudian munculah kesetaraan gender melalui bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang memberi dan membawa solusi atas permasalahan – permasalahan terhadap perempuan, dimana diharapkan dapat membawa keadaan yang lebih baik dalam sebuah kehidupan masyarakat dan negara. Peluang dari adanya kesetaraan gender inilah yang dapat memberikan solusi bahwasanya perempuan pun bisa sama dengan laki-laki dan mampu berpartisipasi aktif dalam sebuah pembangunan serta membawa perubahan ke arah yang lebih optimal.

Penelitian ini mengambil Teori Actors. Dikutip dari artikel yang berjudul Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat oleh Karjuni Dt. Maani, dalam Jurnalnya yaitu Jurnal Demokrasi(Vol. X No. 1, 2011), Sarah Cook dan Steve Macaulay dalam *Perfect Empowerment* (1997) mengemukakan bahwa teori perspektif Actors merupakan teori yang paling digunakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena dalam teori ini masyarakat bebas melakukan

apapun dalam mendapatkan kebebasan. Teori actors merupakan teori yang mengungkapkan bahwa masyarakat sebagai subjek yang mampu melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang melalui kendali tertentu dan memberikan kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide, keputusan, dan tindakan (Maani, 2011:59).

Actors singkatan dari A(*Authority*) atau wewenang, C(*Confidence and Competence*) atau percaya diri dan kemampuan, T(*Trust*) atau keyakinan, O(*Oppurtinities*) atau kesempatan, R(*Responsibilities*) atau tanggungjawab dan S(*Support*) atau dukungan. Dengan menerapkan teori actors yang dimana teori ini sebagai *empowerment*, maka pemberdayaan masyarakat dapat tumbuh dengan baik dan mampu berperan dari dalam masyarakat, pemerintah dan non pemerintah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia.

3. Kerangka Konseptual

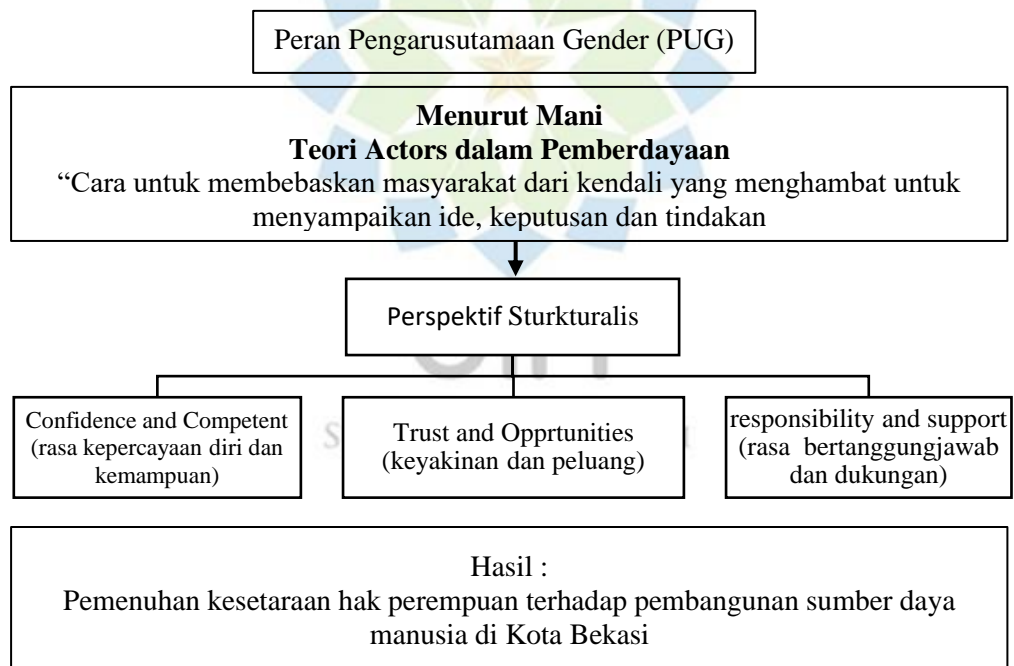
Kerangka konseptual penelitian adalah keterhubungan teori dengan penelitian yang diteliti. Teori Actors yang dikemukakan oleh Maani yang mengatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat” sebagai cara untuk membebaskan masyarakat dari kendali yang menghambat untuk menyampaikan ide, keputusan dan tindakan. Pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk membangun kemandirian pada individu atau kelompok masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan.

Hambatan dalam pemberdayaan masyarakat bahwa masih kurangnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman masyarakat. Hambatan yaitu halangan pada suatu keadaan yang tidak dikehendaki oleh seseorang yang dapat menghambat

perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan bagi orang lain maupun pada diri sendiri (Poerwandarminta,1991).

Program pemberdayaan dalam penelitian ini lebih fokus dan ditujukan kepada peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kerjasama antara stakeholder dengan masyarakat dalam upaya pengungkapan, penyelesaian, serta peningkatan kualitas kelembagaan bidang pemerintah.

Berikut skema kerangka konseptual tentang Peran Pengarus Utama Gender (PUG) terhadap Kesetaraan Hak Pemberdayaan Perempuan :



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) DPPPA Kota Bekasi, Jl. Ahmad Yani No.1 RT.001/RW.005, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat 17144. Adapun alasan

penelitian dilakukan, karena dimulai dari keresahan masyarakat atas pemenuhan hak gender serta kebijakan yang kurang optimal. Lokasi penelitian ini dekat dengan tempat tinggal sehingga terjangkau dan hemat biaya sehingga memudahkan untuk mendapatkan data informasi.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Paradigma kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis yang didukung dengan fakta-fakta pada saat penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data kualitatif pada umumnya menggunakan data berupa teknik observasi dan wawancara. Dalam paradigma inilah yang menjadi realita sosial karena dianggap sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, berkembang dan bermakna.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada kenyataan saat ini (Sujana dan Ibrahim, 1989:65). Metode deskriptif sebagai metode yang digunakan guna menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian namun tidak digunakan dalam membuat suatu kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005: 21).

Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta melalui pandangan yang tepat. Jadi, metode deskriptif dapat diartikan sebagai langkah-langkah dalam pemecahan masalah yang dapat menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam suatu penelitian. Metode ini dapat berupa orang, lembaga serta masyarakat yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data penelitian ini adalah data yang pasti, data yang sebenarnya terjadi. Dalam mendapatkan data yang pasti diperlukan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data dapat diperoleh. Data yang dapat diperoleh merupakan data kualitatif. Sumber data pada data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kabid (Kepala bidang) dan Kasi (Kepala divisi) serta beberapa Pengurus lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG).

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu pada buku dan teori yang relevan serta dokumen-dokumen tentang bidang Pengarusutamaan Gender (PUG).

5. Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan penelitian ini mengambil teknik purposive bersifat snow ball sampling. Sampel sumber data ini bersifat sementara dan dapat

berkembang. Orang yang dipilih sebagai informan mempunyai pengaruh, memahami atau terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti. Supaya data yang didapat relevan. Dalam penelitian ini peneliti memilih anggota bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) DPPPAA Kota Bekasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara dua orang atau lebih, arah pembicaraannya mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan anggota bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) DPPPAA Kota Bekasi.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk melakukan penelitian dengan proses pengamatan secara langsung dan teratur. Memperoleh data-data melalui observasi selanjutnya di catat pada catatan observasi. Dalam kegiatan pencatatan datapun melalui bagian hasil pengamatan. Observasi pada penelitian ini dilakukan di bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) DPPPAA Kota Bekasi. Observasi langsung dilakukan guna mengetahui bagaimana program kerja, pelaksanaan kinerja serta hambatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan kesetaraan hak pemberdayaan perempuan.

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik Triangulasi sebagai pendekatan multimetode yang dilalui oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data, supaya dapat dipahami dengan baik ide dasar dari teknik ini dengan memperoleh kebenaran dari berbagai sudut pandang. Teknik Triangulasi disebut sebagai upaya dalam mengecek kebenaran suatu data atau informasi yang di peroleh peneliti dengan mengurangi sebanyak mungkin data atau informasi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menurut Norman K. Denkin, tehnik Triangulasi merupakan gabungan dari berbagai metode yang dipakai untuk menganalisis fenomena yang saling berkaitan dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Menurut Norman K. Denkin tehnik ini memiliki empat hal, yaitu :

a. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Melalui metode wawancara dan observasi peneliti dapat mengecek suatu kebenaran informasi, selain menggunakan metode wawancara dan observasi peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi.

b. Triangulasi antar-peneliti dapat dilakukan melalui lebih dari satu orang dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Pada tahap triangulasi antar-peneliti ini, informan sebagai pemberi informasi harus mencari sumber informan yang berpengalaman pada bidangnya dan bebas dari konflik.

c. Triangulasi sumber data kegiatan yang menemukan suatu kebenaran informasi melalui berbagai macam metode dan sumber perolehan data. Peneliti dapat menggunakan cara melalui observasi terlibat (*participant observation*)

misalnya dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, tulisan pribadi dan foto.

Dari hasil tahapan ini peneliti akan menemukan sebuah pandangan yang berbeda tentang fenomena yang diteliti. Teori triangulasi ini sebagai hasil penelitian kualitatif berupa rumusan informasi. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang sesuai supaya mendapatkan kesimpulan.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data hanya berfokus pada data yang bersifat kualitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan proses menganalisis konsep dari suatu permasalahan dan tidak disertai data berupa angka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan hasil analisis data dengan terstruktur, sesuai fakta dan akurat pada fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik analisis data kualitatif memiliki 4 langkah, menurut Miles dan Huberman (1992:15-19) yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data sebagai tahap lanjutan dalam teknik analisis data. Reduksi data digunakan untuk mengolah data yang sesuai dengan penelitian. Dalam kegiatan reduksi data memiliki beberapa tahapan seperti memperkuat hasil analisis data, memilah data yang tidak diperlukan, mengarahkan dan menggolongkan data sehingga mendapatkan kesimpulan diakhir dan dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data sebagai tahap dalam mengelompokkan data dari hasil penelitian yang telah diolah pada tahapan sebelumnya. Tahapan ini membantu menyimpulkan data pada tahapan sebelumnya yang akan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai tahapan akhir yang didapat dari hasil pengumpulan data, reduksi data serta penyajian data. Dalam tahapan penarikan kesimpulan peneliti harus paham mengenai suatu yang telah di teliti langsung di lapangan dengan menyusun pola dan konsep hasil penelitian.

